

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pengelolaan Gedung olahraga Padang Panjang sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 dalam pengelolaan Gedung Olahraga Padang Panjang belum terlaksana secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh belum terpenuhinya prinsip-prinsip pengelolaan aset daerah yang meliputi kepastian status hukum aset, tertib administrasi, serta efektivitas pengelolaan. Lemahnya aspek perencanaan, pengawasan, dan penganggaran, serta belum adanya struktur kelembagaan pengelola yang jelas menjadi indikator utama belum optimalnya implementasi Perda tersebut. Kondisi ini berdampak pada tidak maksimalnya pemanfaatan aset dalam menunjang pelayanan publik dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pengelolaan aset daerah tersebut secara administratif telah berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga pada bidang sarana dan prasarana. Pengelolaan ini mengacu pada ketentuan peraturan daerah yang mengatur

pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap barang milik daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan anggaran untuk perawatan dan perbaikan fasilitas gedung sehingga pemanfaatan gedung olahraga belum berjalan secara optimal. Selain itu, proses pemeliharaan dan perbaikan aset daerah masih bergantung pada ketersediaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD serta proses administrasi yang harus dilalui dalam pengajuan perbaikan. Hal ini menyebabkan beberapa fasilitas belum dapat diperbaiki secara cepat sehingga berdampak pada efektivitas penggunaan gedung olahraga tersebut oleh masyarakat.

2. Jika ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah, pengelolaan aset daerah seperti gedung olahraga Padang Panjang merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan untuk mengelola sumber daya publik demi kemaslahatan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa aset daerah dikelola secara amanah, efektif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu, optimalisasi pengelolaan dan pemeliharaan aset daerah menjadi hal penting agar tujuan pelayanan publik dapat tercapai. Pengelolaan gedung olahraga belum memenuhi prinsip-prinsip dasar

pemerintahan Islam seperti amanah, masalah, efisiensi, keadilan, dan hifzh al-mal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Pemerintah Daerah, khususnya instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Gedung Olahraga Padang Panjang, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 melalui penguatan koordinasi antarinstansi, penyediaan anggaran yang memadai, pembentukan struktur pengelolaan yang lebih jelas, serta peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan aset daerah. Upaya tersebut perlu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip *good governance* serta nilai-nilai *siyasah tanfidziyah*, sehingga pengelolaan aset daerah mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengelolaan barang milik daerah maupun implementasi kebijakan publik dalam perspektif hukum tata negara dan *fiqh siyasah*. Peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian,

menggunakan pendekatan atau teori implementasi kebijakan yang lebih beragam, serta membandingkan pengelolaan aset daerah di beberapa wilayah agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif dan mampu memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Alamsyah. Kamal, *Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi)*, (Bandung: Medi Citra Mandiri Press, 2016)
- Andiko. Toha, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016)
- Asshiddiqie. Jimly, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Dzajuli. A., *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003)
- Iqbal. Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019)
- Iqbal. Muhammad, *Fiqh Siyasah*, (surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2014)
- Jumadi, *Kedudukan dan Fungsi, Peraturan Daerah, Sistem Perundangundangan Indonesia*. (Makassar: Bella Barakka, 2017)
- Karmanis, M. S., & St, K. *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: CV. Pilar Nusantara, 2021)
- Madjid. Nurcholis, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2003
- Prodjodikoro. Wirjono, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)

Rahayu. Ani Sri, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

Rahman. Abdul, *Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Teras, 2015)

Riau. Dwi Putranto, *Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019)

Saebani. Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah, Cet. 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)

Susila. Ismet, *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015)

Telaumbanua, D. "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Education And Development*", 2018. 4(1),

Tongam R. Silaban Dkk., *Hukum Peraturan Daerah: Teori Dan Praktik*, Prenada Media, 2025

Ubarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

Yustisia. Tim Visi, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya*, Visimedia Pustaka, 2015

Skripsi/Disertasi

Abdal, *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2015), h. 168

Annisa, N. (2023). *Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Kota Bengkulu)* (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu).

Apriandi, I. *Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam Di Kota Langsa* (Doctoral Dissertation, Universitas Medan Area, 2017).

Arya Werdana, *"Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Terhadap Aset Daerah (Studi Mess Pemda Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyyah)"*. Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (Uin) Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022.

Aulia, Nur Insani. Berjudul *"Pelaksanaan Prosedur Persertifikatan Aset Tanah Pemerintah Kota Makasar Oleh Dinas Pertanahan Kota Makasar."*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019.

Chindy Gabriela Riro *"Strategi Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah"*, Diploma thesis. Institute Pemerintahan Dalam Negeri, 2023.

Efrianto, J. *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 62 Tentang Tertib Pelajar Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasa (Studi Di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu)* (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024).

Hanum, K. F. (2024). *Realisasi Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar Perspektif Fikih Siyasa* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Leo Jabar Abdallah, *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur Perspektif Siyasa Maliyah (Studi Pada Bpkad Kabupaten Lampung Timur)"* Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1445 H / 2023 M.

Rifandi Restu Fahmi, "Analisis Hukum Pemanfaatan Aset Desa Oleh Kepala Desa", Merupakan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2023.

Sandhika Fajriansyah "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Rusak Perspektif Siyasa Dusturiyah.", Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Uinfas) Bengkulu. 2024.

Wibowo, Y. S. *Implementasi Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 (Studi Karaoke Kota Bengkulu Perpektip Siyasa Dusturiah)* (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

Jurnal/Artikel

Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan, *Metode Wawancara Dalam Penelitian Hukum Doktrinal Dan Sosio-Legal, Undang: Jurnal Hukum* Vol. 6 No. 2 (2023).

Bunga, M. "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*", 2020. 49(4), 818-833.

Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 1 (2015)

Desky A. Akbar Et Al., *Skema Pembentukan Produk Hukum Perbup Di Aceh Tenggara, Journal Edu* Vol. 9 No. 2 (2023)

Donna Okthalia Setiabudhi "Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance." *Jurnal The Studies Of Social Science* Volume 1, Number1, 2019.

Fauzan, A. "Model Implementasi Kebijakan Publik". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 2024. 17929-17938.

Hasfi, Nyemas, Martoyo Dan Dwi Haryono. Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Dpkad Kab. Sintang Tahun 2013. Jurnal Tesis Pmis-Untan-Psian-2013. h 2

I'tishan Et Al., *Model Of Islamic Governance And Judicial Independence* (2025)

Maizul Imran, *Qiyās Dan Analogi Hukum (Suatu Telaah Dalam Penemuan Hukum Islam)*, *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 2 No. 1 (2022).

Nomor, P. M. D. N. (80). Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). *Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor, 120.*

Profil Gedung Padang Panjang Bengkulu Selatan 2024

Qomaruddin & Halimah Sa'diyah, "*Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley*" Miles Dan Huberman, *Journal Of Management, Accounting, And Administration* Vol. 1 No. 2 (2024)

Widelia Nadiffa & Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif, Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* (2022)

Yasid & Makhshushi Zakīyah, "*Perspektif Maqāṣid Al-Syariah Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam*", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 29 No. 2 (2022)